

## **Determinan Belanja Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi**

**Yowana Rachma Mutmaina**

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi

*e-mail korespondensi: marthynl@yahoo.co.id*

### **Abstract.**

This study aimed to analyze: 1) The allocation of personnel expenditures in the district/city in Jambi Province. 2) Factors affecting personnel expenditure in the Regency / City in Jambi Province. The data used is secondary data based on panel data. The analysis tool used is panel data regression analysis. The results of the study found that: 1) During the period 2010-2014, the development of personnel spending in districts / city in Jambi Province showed an increasing trend; 2) The number of employees has a significant negative and significant impact on the expenditure of district / municipality employees in Jambi Province, while the number of Local Government's Agencies (SKPD) has a positive and significant impact.

---

*Key Word : Personnel Expenditure, employees dan Local Governments' Agencies*

### **Abstrak.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Alokasi belanja pegawai kabupaten/kota di Provinsi Jambi. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pegawai pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Data yang digunakan adalah data sekunder berdasarkan data panel. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menemukan bahwa: 1) Selama periode 2010-2014, perkembangan belanja pegawai pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat; 2) Jumlah pegawai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja pegawai Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, sedangkan jumlah SKPD berpengaruh positif dan signifikan.

---

*Kata Kunci : Belanja Pegawai, Pegawai, Satuan Kerja Perangkat Daerah*

### **PENDAHULUAN**

Desentralisasi dan otonomi daerah yang didorong melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan warna tersendiri dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Penyerahan wewenang ini tentu saja bukan tanpa maksud. Tujuan penyerahan wewenang tersebut selain agar terciptanya suatu organisasi pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis, dan tidak korup juga tentunya. Otonomi daerah juga diterapkan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah itu sendiri.

Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Oleh karena itu, hendaknya Pemerintah

daerah memproporsikan lebih besar belanja modal, agar terciptanya peningkatan infrastruktur yang akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan potensi PAD dari berbagai sektor perekonomian sehingga PAD semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Namun kenyataannya porsi belanja tidak langsung selalu lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung. Padahal belanja langsung berpengaruh langsung terhadap tingkat perkembangan perekonomian daerah, sehingga seharusnya porsi belanja langsung ini lebih besar daripada belanja tidak langsung. Kondisi ini adalah disebabkan dengan semakin besarnya jumlah PNS dan/atau honorer yang digunakan sebagai aparatur pelaksana di daerah.

Belanja pegawai dalam penelitian ini adalah belanja tidak langsung (Permendagri 13 Tahun 2006) yaitu belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ditambah dengan uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai. Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupagaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaanyang dilakukan.

Belanja pegawai merupakan belanja yang ditujukan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan rutin suatu instansi pemerintah, sebagaimana ditentukan dalam tujuan pokok dan fungsinya. Kelompok belanja ini memiliki porsi terbesar dalam struktur belanja yang anggarannya bersumber dari APBN pada sebuah instansi/satuan kerja. Besar anggaran satu satuan kerja/instansi berbeda-beda dengan keragaman jenis belanja yang juga berbeda. Beberapa permasalahan dan resiko yang timbul dalam pelaksanaan belanja pegawai yaitu :

- 1) Kemungkinan adanya data pegawai fiktif.  
Kewenangan pengelolaan belanja pada satuan kerja selain dalam hal kemudahan pengelolaan dan pencapaian sasaran program, hal ini dilain sisi juga dapat menimbulkan adanya kegiatan-kegiatan ataupun belanja fiktif yang dapat dimintakan pencairan dananya selama seluruh persyaratan telah dipenuhi.
- 2) Ketidajelasan jumlah pegawai honorer.  
Peningkatan jumlah pegawai honorer tidak disertai dengan kejelasan mengenai jumlah pasti dari pegawai honorer, dan juga banyak terdapat pegawai bayanganyang terdapat didaerah.
- 3) Tidak efisien dalam pembentukan satuan kerja.  
Dalam pembentukan satuan kerja sering kali jumlah anggota melebihi dari jumlah anggota yang seharusnya. Hal ini menyebabkan kegiatan yang dilakukan satuan kerja menjadi tidak efisien.
- 4) Pemborosan anggaran.  
Pengelolaan belanja pegawai ditujukan untuk pencapaian program satuan kerja. Namun dalam prakteknya efektifitas penggunaan anggaran tidak dijalankan dengan baik, sehingga sering terjadi pelaksanaan kegiatan yang tidak menunjang atau berpengaruh pada pencapaian program yang telah ditetapkan.
- 5) Pelaksanaan kegiatan yang tidak terlaksana.  
Perencanaan anggaran dilakukan satu tahun sebelum anggaran suatu kementrian/lembaga disetujui. Dalam perencanaan itu setiap satuan kerja melalui kementriannya mengajukan usulan kegiatan dan anggaran yang akan dijalankan

selama satu tahun kedepan. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi permasalahan yang timbul yang pada akhirnya menyebabkan tidak terlaksananya suatu kegiatan yang telah direncanakan.

Rasio belanja pegawai tidak langsung terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah terhadap pembayaran gaji pegawai PNSD. Semakin besar rasionya maka semakin besar belanja daerah yang dibelanjakan untuk membayar gaji pegawai daerah dan sebaliknya, semakin kecil angka rasionya maka semakin kecil belanja daerah yang dipergunakan untuk membayar gaji pegawai daerah. Pada tahun 2010 proporsi belanja pegawai kabupaten/kota di Provinsi Jambi terhadap total belanja daerah adalah sebesar 43,9%. Pada tahun 2010 yang memiliki proporsi belanja pegawai paling kecil adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar 27,7%, sedangkan yang memiliki proporsi paling besar adalah Kota Jambi yaitu sebesar 63,1%.

Penganggaran biaya yang efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan pembangunan di daerah. Namun, fenomena penganggaran biaya pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada alokasi belanja pegawai, ditemukan persentase belanja pegawai tidak langsung rata-rata sebesar 50% yang digunakan untuk membiayai gaji pegawai dan sisanya untuk belanja lainnya. Kesenjangan ini tentunya berdampak pada pencapaian keberhasilan pembangunan, dikarenakan belanja pegawai sebagai anggaran belanja terbesar yang menyerap dana APBD, dimana idealnya belanja modal seharusnya lebih besar dari belanja pegawai karena belanja modal secara langsung digunakan untuk kepentingan publik.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Alokasi belanja pegawai kabupaten/kota di Provinsi Jambi. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pegawai pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

## **METODE**

### **Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data panel yaitu kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama Tahun 2010-2014. Data bersumber dari instansi teknis terkait seperti: Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jambi dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.

### **Metode Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Untuk menganalisis alokasi belanja pegawai dilakukan secara deskriptif berdasarkan data belanja pegawai dalam Laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Jambi. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pegawai pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Tahun Anggaran 2010-2014 dengan menggunakan analisis regresi data panel, dengan persamaan sebagai berikut:

$$BP = \alpha + \beta_1 JP + \beta_2 JS + e_i$$

dimana :

BP = Belanja pegawai

JP = Jumlah pegawai

JS = Jumlah SKPD

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  -  $\beta_2$  = Koefisien regresi

$e_i$  = Error term

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Alokasi Belanja Pegawai kabupaten/kota di Provinsi Jambi

Belanja pegawai pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi dari tahun ke tahun secara nominal mengalami peningkatan. Berdasarkan Tabel 1. Terlihat bahwa secara rata-rata pertumbuhan belanja pegawai kabupaten/kota pada periode tahun 2010 sampai dengan 2014 meningkat sebesar 14,75%. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada Kabupaten Merangin dengan rata-rata sebesar 19,94 persen pertahun. Sebaliknya pertumbuhan belanja pegawai terendah yaitu Kabupaten Kerinci, dengan rata-rata sebesar 5,31% pertahun.

**Tabel 1. Perkembangan Belanja Pegawai pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2014 (dalam Juta Rupiah)**

| No.           | kabupaten/kota          | Tahun            |                  |                  |                  |                  | Rata-rata    |
|---------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|               |                         | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | 2014             |              |
| 1             | Batanghari              | 247,773          | 288,983          | 308,207          | 386,504          | 421,429          | 14.43        |
|               | <i>Perkembangan (%)</i> |                  | 16.63            | 6.65             | 25.40            | 9.04             |              |
| 2             | Bungo                   | 292,507          | 348,219          | 378,226          | 481,663          | 504,002          | 14.91        |
|               | <i>Perkembangan (%)</i> |                  | 19.05            | 8.62             | 27.35            | 4.64             |              |
| 3             | Kerinci                 | 277,940          | 295,994          | 297,112          | 326,643          | 341,110          | 5.31         |
|               | <i>Perkembangan (%)</i> |                  | 6.50             | 0.38             | 9.94             | 4.43             |              |
| 4             | Merangin                | 251,818          | 273,128          | 358,514          | 398,636          | 513,664          | 19.94        |
|               | <i>Perkembangan (%)</i> |                  | 8.46             | 31.26            | 11.19            | 28.86            |              |
| 5             | Muaro Jambi             | 261,493          | 333,695          | 332,101          | 370,740          | 439,615          | 14.34        |
|               | <i>Perkembangan (%)</i> |                  | 27.61            | (0.48)           | 11.63            | 18.58            |              |
| 6             | Sarolangun              | 204,724          | 253,687          | 289,641          | 316,244          | 364,668          | 15.65        |
|               | <i>Perkembangan (%)</i> |                  | 23.92            | 14.17            | 9.18             | 15.31            |              |
| 7             | Tanjabbar               | 246,679          | 302,461          | 336,926          | 366,393          | 424,877          | 14.68        |
|               | <i>Perkembangan (%)</i> |                  | 22.61            | 11.39            | 8.75             | 15.96            |              |
| 8             | Tanjatim                | 200,449          | 230,974          | 266,701          | 281,185          | 293,856          | 10.16        |
|               | <i>Perkembangan (%)</i> |                  | 15.23            | 15.47            | 5.43             | 4.51             |              |
| 9             | Tebo                    | 164,992          | 234,110          | 265,471          | 297,028          | 331,557          | 19.70        |
|               | <i>Perkembangan (%)</i> |                  | 41.89            | 13.40            | 11.89            | 11.62            |              |
| 10            | Jambi                   | 391,037          | 461,610          | 520,099          | 603,878          | 665,856          | 14.27        |
|               | <i>Perkembangan (%)</i> |                  | 18.05            | 12.67            | 16.11            | 10.26            |              |
| 11            | Sungai Penuh            | 140,692          | 188,947          | 194,243          | 236,976          | 276,134          | 18.91        |
|               | <i>Perkembangan (%)</i> |                  | 34.30            | 2.80             | 22.00            | 16.52            |              |
| <b>JUMLAH</b> |                         | <b>2,680,104</b> | <b>3,211,808</b> | <b>3,547,241</b> | <b>4,065,890</b> | <b>4,576,768</b> | <b>14.75</b> |

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan RI (data diolah) Tahun 2015

Selanjutnya berdasarkan Tabel 2. berikut terlihat bahwa alokasi belanja pegawai terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode tahun 2010 sampai dengan 2014 secara rata-rata sebesar 50 % per tahun. Bila dilihat dari belanja daerah, alokasi belanja pegawai yang tertinggi yaitu Kota Jambi dengan rata-rata sebesar 57,10%, dan yang terendah yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan alokasi belanja pegawai terhadap belanja daerah yaitu sebesar 30,16%.

Apabila pengalokasian dana APBD kabupaten/kota di Provinsi Jambi seperti yang digambarkan pada Tabel 2. tetap berlangsung dalam jangka panjang, tanpa adanya perubahan yang signifikan untuk mengurangi alokasi belanja pegawai yang tidak produktif, maka diperlukan moratorium perekrutan PNS agar kapasitas perekonomian daerah diharapkan meningkat secara signifikan. Pengalokasian dana belanja pegawai kabupaten/kota secara tidak produktif menjadi penentu utama perlambatan aktivitas perekonomian daerah tersebut. Setiap perubahan alokasi dana belanja pegawai ke berbagai bentuk belanja daerah lainnya akan menimbulkan dampak yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, komposisi tersebut harus ditinjau kembali untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah.

**Tabel 2. Rasio Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kotadi Provinsi Jambi Tahun 2010-2014 (dalam Juta Rupiah)**

| No. | Kab/Kota   | Jenis Belanja | Tahun   |         |         |           |           | Rata-rata |
|-----|------------|---------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
|     |            |               | 2010    | 2011    | 2012    | 2013      | 2014      |           |
| 1   | Batanghari | B. Pegawai    | 247,773 | 288,983 | 308,207 | 386,504   | 421,429   | 44.67     |
|     |            | B. Daerah     | 520,570 | 589,512 | 756,140 | 875,110   | 1,007,493 |           |
|     |            | Rasio (%)     | 47.60   | 49.02   | 40.76   | 44.17     | 41.83     |           |
| 2   | Bungo      | B. Pegawai    | 292,507 | 348,219 | 378,226 | 481,663   | 504,002   | 47.42     |
|     |            | B. Daerah     | 706,240 | 660,642 | 730,824 | 1,051,265 | 1,110,602 |           |
|     |            | Rasio (%)     | 41.42   | 52.71   | 51.75   | 45.82     | 45.38     |           |
| 3   | Kerinci    | B. Pegawai    | 277,940 | 295,994 | 297,112 | 326,643   | 341,110   | 45.58     |
|     |            | B. Daerah     | 537,886 | 630,288 | 700,273 | 744,853   | 793,595   |           |
|     |            | Rasio (%)     | 51.67   | 46.96   | 42.43   | 43.85     | 42.98     |           |
| 4   | Merangin   | B. Pegawai    | 251,818 | 273,128 | 358,514 | 398,636   | 513,664   | 46.28     |
|     |            | B. Daerah     | 550,178 | 648,321 | 774,744 | 859,256   | 1,010,400 |           |
|     |            | Rasio (%)     | 45.77   | 42.13   | 46.28   | 46.39     | 50.84     |           |
| 5   | Ma.Jambi   | B. Pegawai    | 261,493 | 333,695 | 332,101 | 370,740   | 439,615   | 44.58     |
|     |            | B. Daerah     | 530,030 | 658,726 | 759,551 | 953,832   | 1,090,415 |           |
|     |            | Rasio (%)     | 49.34   | 50.66   | 43.72   | 38.87     | 40.32     |           |
| 6   | Sarolangun | B. Pegawai    | 204,724 | 253,687 | 289,641 | 316,244   | 364,668   | 38.65     |
|     |            | B. Daerah     | 505,877 | 624,837 | 872,293 | 812,066   | 911,344   |           |
|     |            | Rasio (%)     | 40.47   | 40.60   | 33.20   | 38.94     | 40.01     |           |
| 7   | Tanjabbar  | B. Pegawai    | 246,679 | 302,461 | 336,926 | 366,393   | 424,877   | 35.07     |
|     |            | B. Daerah     | 589,741 | 780,225 | 900,628 | 1,279,626 | 1,480,569 |           |
|     |            | Rasio (%)     | 41.83   | 38.77   | 37.41   | 28.63     | 28.70     |           |
| 8   | Tanjabtjm  | B. Pegawai    | 200,449 | 230,974 | 266,701 | 281,185   | 293,856   | 30.16     |
|     |            | B. Daerah     | 723,277 | 694,111 | 857,529 | 948,779   | 1,010,131 |           |
|     |            | Rasio (%)     | 27.71   | 33.28   | 31.10   | 29.64     | 29.09     |           |
| 9   | Tebo       | B. Pegawai    | 164,992 | 234,110 | 265,471 | 297,028   | 331,557   | 38.81     |
|     |            | B. Daerah     | 498,266 | 571,209 | 637,123 | 751,060   | 856,016   |           |
|     |            | Rasio (%)     | 33.11   | 40.99   | 41.67   | 39.55     | 38.73     |           |
| 10  | Jambi      | B. Pegawai    | 391,037 | 461,610 | 520,099 | 603,878   | 665,856   | 57.10     |
|     |            | B. Daerah     | 619,303 | 797,797 | 902,006 | 1,114,842 | 1,264,596 |           |
|     |            | Rasio (%)     | 63.14   | 57.86   | 57.66   | 54.17     | 52.65     |           |
| 11  | S.Penuh    | B. Pegawai    | 140,692 | 188,947 | 194,243 | 236,976   | 276,134   | 39.57     |
|     |            | B. Daerah     | 328,622 | 464,917 | 557,944 | 642,034   | 647,460   |           |
|     |            | Rasio (%)     | 42.81   | 40.64   | 34.81   | 36.91     | 42.65     |           |

Sumber : Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan RI (data diolah) Tahun 2015

Selanjutnya, Tabel 3. menunjukkan kontribusi belanja pegawai terhadap belanja tidak langsung kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode tahun 2010 sampai dengan 2014, secara rata-rata sebesar 86,30% per tahun. Bila dilihat dari belanja tidak langsung, kontribusi belanja pegawai yang tertinggi yaitu Kota Jambi secara rata-rata sebesar 94,95%, diikuti oleh Kabupaten Merangin yaitu sebesar 88,15%.

Kontribusi belanja pegawai terhadap belanja tidak langsung terendah ditempati oleh Kabupaten Batanghari yaitu sebesar 81,81%. Sehingga apabila kontribusi dana APBD kabupaten/kota di Provinsi Jambi seperti yang digambarkan tersebut tetap berlangsung dalam jangka panjang, tanpa adanya perubahan yang signifikan untuk mengurangi kontribusi belanja pegawai yang tidak produktif, maka penggunaan anggaran belanja tidak langsung hanya digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS.

**Tabel 3. Perbandingan Belanja Pegawai dan Belanja Tidak Langsung kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2014 (dalam Juta Rupiah)**

| No. | Kab/Kota   | Jenis Belanja | Tahun   |         |         |         |         | Rata-rata |
|-----|------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|     |            |               | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    |           |
| 1   | Batanghari | B. Pegawai    | 247,773 | 288,983 | 308,207 | 386,504 | 421,429 | 81.81     |
|     |            | BTL           | 343,337 | 351,968 | 363,468 | 451,604 | 499,278 |           |
|     |            | Rasio (%)     | 72.17   | 82.10   | 84.80   | 85.58   | 84.41   |           |
| 2   | Bungo      | B. Pegawai    | 292,507 | 348,219 | 378,226 | 481,663 | 504,002 | 86.35     |
|     |            | BTL           | 357,308 | 395,329 | 435,377 | 539,160 | 588,988 |           |
|     |            | Rasio (%)     | 81.86   | 88.08   | 86.87   | 89.34   | 85.57   |           |
| 3   | Kerinci    | B. Pegawai    | 277,940 | 295,994 | 297,112 | 326,643 | 341,110 | 83.66     |
|     |            | BTL           | 359,837 | 352,022 | 334,652 | 394,656 | 399,263 |           |
|     |            | Rasio (%)     | 77.24   | 84.08   | 88.78   | 82.77   | 85.43   |           |
| 4   | Merangin   | B. Pegawai    | 251,818 | 273,128 | 358,514 | 398,636 | 513,664 | 88.15     |
|     |            | BTL           | 322,259 | 313,933 | 386,649 | 447,625 | 547,465 |           |
|     |            | Rasio (%)     | 78.14   | 87.00   | 92.72   | 89.06   | 93.83   |           |
| 5   | Ma.Jambi   | B. Pegawai    | 261,493 | 333,695 | 332,101 | 370,740 | 439,615 | 86.72     |
|     |            | BTL           | 329,819 | 397,764 | 365,044 | 412,536 | 490,845 |           |
|     |            | Rasio (%)     | 79.28   | 83.89   | 90.98   | 89.87   | 89.56   |           |
| 6   | Sarolangun | B. Pegawai    | 204,724 | 253,687 | 289,641 | 316,244 | 364,668 | 83.81     |
|     |            | BTL           | 273,825 | 315,171 | 323,883 | 367,233 | 413,322 |           |
|     |            | Rasio (%)     | 74.76   | 80.49   | 89.43   | 86.12   | 88.23   |           |
| 7   | Tanjabbar  | B. Pegawai    | 246,679 | 302,461 | 336,926 | 366,393 | 424,877 | 87.14     |
|     |            | BTL           | 299,771 | 348,117 | 372,959 | 402,214 | 499,379 |           |
|     |            | Rasio (%)     | 82.29   | 86.88   | 90.34   | 91.09   | 85.08   |           |
| 8   | Tanjabtjm  | B. Pegawai    | 200,449 | 230,974 | 266,701 | 281,185 | 293,856 | 83.64     |
|     |            | BTL           | 269,258 | 277,042 | 305,433 | 322,880 | 341,809 |           |
|     |            | Rasio (%)     | 74.45   | 83.37   | 87.32   | 87.09   | 85.97   |           |
| 9   | Tebo       | B. Pegawai    | 164,992 | 234,110 | 265,471 | 297,028 | 331,557 | 86.87     |
|     |            | BTL           | 210,472 | 267,974 | 294,921 | 341,223 | 362,148 |           |
|     |            | Rasio (%)     | 78.39   | 87.36   | 90.01   | 87.05   | 91.55   |           |
| 10  | Jambi      | B. Pegawai    | 391,037 | 461,610 | 520,099 | 603,878 | 665,856 | 94.95     |
|     |            | BTL           | 433,262 | 489,881 | 534,561 | 638,773 | 676,597 |           |
|     |            | Rasio (%)     | 90.25   | 94.23   | 97.29   | 94.54   | 98.41   |           |
| 11  | Sei. Penuh | B. Pegawai    | 140,692 | 188,947 | 194,243 | 236,976 | 276,134 | 86.26     |
|     |            | BTL           | 184,207 | 219,598 | 229,977 | 264,044 | 291,621 |           |
|     |            | Rasio (%)     | 76.38   | 86.04   | 84.46   | 89.75   | 94.69   |           |

Sumber : Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan RI (data diolah) Tahun 2015

**Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pegawai pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi**

Estimasi regresi data panel faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pegawai pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) diberikan sebagai berikut:

***Pooled Least Square (Common-Constant)***

Estimasi regresi data panel dengan model *Pooled Least Square* (PLS) diberikan pada Tabel 4 berikut.

**Tabel 4. Hasil Estimasi Pooled Least Square**

| Dependent Variable: BP?                |             |                       |             |          |
|--|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| Method: Pooled Least Squares           |             |                       |             |          |
| Sample: 2010 2014                      |             |                       |             |          |
| Included observations: 5               |             |                       |             |          |
| Cross-sections included: 11            |             |                       |             |          |
| Total pool (balanced) observations: 55 |             |                       |             |          |
| Variable                               | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.    |
| C                                      | -5065794.   | 696941.7              | -7.268604   | 0.0000   |
| JP?                                    | -43.54083   | 8.771670              | -4.963802   | 0.0000   |
| JS?                                    | 129676.5    | 16649.92              | 7.788416    | 0.0000   |
| R-squared                              | 0.540909    | Mean dependent var    |             | 328760.2 |
| Adjusted R-squared                     | 0.523252    | S.D. dependent var    |             | 105328.9 |
| S.E. of regression                     | 72726.40    | Akaike info criterion |             | 25.27980 |
| Sum squared resid                      | 2.75E+11    | Schwarz criterion     |             | 25.38929 |
| Log likelihood                         | -692.1944   | Hannan-Quinn criter.  |             | 25.32214 |
| F-statistic                            | 30.63370    | Durbin-Watson stat    |             | 0.582904 |
| Prob(F-statistic)                      | 0.000000    |                       |             |          |

**Fixed Effect Model**

Estimasi regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM) diberikan pada Tabel 5 berikut

**Tabel 5. Hasil Estimasi Fixed Effect Model**

| Dependent Variable: BP?                |             |                       |             |          |
|--|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| Method: Pooled Least Squares           |             |                       |             |          |
| Sample: 2010 2014                      |             |                       |             |          |
| Included observations: 5               |             |                       |             |          |
| Cross-sections included: 11            |             |                       |             |          |
| Total pool (balanced) observations: 55 |             |                       |             |          |
| Variable                               | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.    |
| C                                      | -5653831.   | 3432519.              | -1.647138   | 0.1070   |
| JP?                                    | -28.50011   | 32.80502              | -0.868773   | 0.3899   |
| JS?                                    | 141677.3    | 79828.44              | 1.774772    | 0.0832   |
| Fixed Effects (Cross)                  |             |                       |             |          |
| _BTH—C                                 | -75715.93   |                       |             |          |
| _BUN—C                                 | 1907.201    |                       |             |          |
| _KER—C                                 | 75760.73    |                       |             |          |
| _MER—C                                 | -9858.637   |                       |             |          |
| _MJB—C                                 | 36233.48    |                       |             |          |
| _SAR—C                                 | -2548.536   |                       |             |          |
| _TJB—C                                 | 32340.01    |                       |             |          |
| _TJT—C                                 | -53225.21   |                       |             |          |
| _TEB—C                                 | -48297.51   |                       |             |          |
| _JMB—C                                 | 23858.41    |                       |             |          |
| _SPN—C                                 | 19545.99    |                       |             |          |
| Effects Specification                  |             |                       |             |          |
| Cross-section fixed (dummy variables)  |             |                       |             |          |
| R-squared                              | 0.646782    | Mean dependent var    |             | 328760.2 |
| Adjusted R-squared                     | 0.545862    | S.D. dependent var    |             | 105328.9 |
| S.E. of regression                     | 70980.90    | Akaike info criterion |             | 25.38127 |
| Sum squared resid                      | 2.12E+11    | Schwarz criterion     |             | 25.85573 |
| Log likelihood                         | -684.9850   | Hannan-Quinn criter.  |             | 25.56475 |
| F-statistic                            | 6.408889    | Durbin-Watson stat    |             | 0.728768 |
| Prob(F-statistic)                      | 0.000003    |                       |             |          |

### Random Effect Model

Estimasi regresi data panel dengan *Random Effect Model* diberikan pada Tabel 6 berikut:

**Tabel 6. Hasil Estimasi Random Effect Model**

| Dependent Variable: BP?                            |             |                    |             |          |
|--|-------------|--------------------|-------------|----------|
| Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) |             |                    |             |          |
| Sample: 2010 2014                                  |             |                    |             |          |
| Included observations: 5                           |             |                    |             |          |
| Cross-sections included: 11                        |             |                    |             |          |
| Total pool (balanced) observations: 55             |             |                    |             |          |
| Swamy and Arora estimator of component variances   |             |                    |             |          |
| Variable   | Coefficient | Std. Error         | t-Statistic | Prob.    |
| C  | -5058066.   | 832350.2           | -6.076849   | 0.0000   |
| JP?  | -43.08348   | 10.41686           | -4.135939   | 0.0001   |
| JS?  | 129448.1    | 19870.91           | 6.514455    | 0.0000   |
| Random Effects (Cross)                             |             |                    |             |          |
| _BTH—C   | -15627.80   |                    |             |          |
| _BUN—C   | 12921.51    |                    |             |          |
| _KER—C   | 9364.901    |                    |             |          |
| _MER—C   | 8233.791    |                    |             |          |
| _MJB—C   | 10987.01    |                    |             |          |
| _SAR—C   | 1498.419    |                    |             |          |
| _TJB—C   | 11087.43    |                    |             |          |
| _TJT—C   | -19791.64   |                    |             |          |
| _TEB—C   | -17895.39   |                    |             |          |
| _JMB—C   | 1657.723    |                    |             |          |
| _SPN—C   | -2435.961   |                    |             |          |
| Effects Specification                              |             |                    |             |          |
|  |             |                    | S.D.        | Rho      |
| Cross-section random                               |             |                    | 23342.31    | 0.0976   |
| Idiosyncratic random                               |             |                    | 70980.90    | 0.9024   |
| Weighted Statistics                                |             |                    |             |          |
| R-squared  | 0.460673    | Mean dependent var |             | 264860.3 |
| Adjusted R-squared                                 | 0.439930    | S.D. dependent var |             | 93242.78 |
| S.E. of regression                                 | 69780.88    | Sum squared resid  |             | 2.53E+11 |
| F-statistic  | 22.20823    | Durbin-Watson stat |             | 0.631588 |
| Prob(F-statistic)                                  | 0.000000    |                    |             |          |
| Unweighted Statistics                              |             |                    |             |          |
| R-squared  | 0.540882    | Mean dependent var |             | 328760.2 |
| Sum squared resid                                  | 2.75E+11    | Durbin-Watson stat |             | 0.581430 |

### Pengujian Model

#### Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih model terbaik diantara dua pendekatan yaitu *Fixed Effect Model* dan *Pooled Least Square* yang akan dipakai model penelitian, dengan syarat :  $P\text{-value} < \alpha$  maka  $H_0$  ditolak dan model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* begitu juga jika  $P\text{-value} > \alpha$  maka  $H_0$  diterima dan model yang dipilih adalah *Pooled Least Square*.

Hasil estimasi pada Uji Chow diberikan dalam Tabel 7.

**Tabel 7. Hasil Estimasi Uji Chow**

| Redundant Fixed Effects Tests              |             |                       |             |          |
|--|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| Pool: Untitled                             |             |                       |             |          |
| Test cross-section fixed effects           |             |                       |             |          |
| Effects Test                               | Statistic   | d.f.                  | Prob.       |          |
| Cross-section F                            | 1.258894    | (10,42)               | 0.2841      |          |
| Cross-section Chi-square                   | 14.418888   | 10                    | 0.1547      |          |
| Cross-section fixed effects test equation: |             |                       |             |          |
| Dependent Variable: BP?                    |             |                       |             |          |
| Method: Panel Least Squares                |             |                       |             |          |
| Sample: 2010 2014                          |             |                       |             |          |
| Included observations: 5                   |             |                       |             |          |
| Cross-sections included: 11                |             |                       |             |          |
| Total pool (balanced) observations: 55     |             |                       |             |          |
| Variable                                   | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.    |
| C  | -5065794.   | 696941.7              | -7.268604   | 0.0000   |
| JP?  | -43.54083   | 8.771670              | -4.963802   | 0.0000   |
| JS?  | 129676.5    | 16649.92              | 7.788416    | 0.0000   |
| R-squared                                  | 0.540909    | Mean dependent var    |             | 328760.2 |
| Adjusted R-squared                         | 0.523252    | S.D. dependent var    |             | 105328.9 |
| S.E. of regression                         | 72726.40    | Akaike info criterion |             | 25.27980 |
| Sum squared resid                          | 2.75E+11    | Schwarz criterion     |             | 25.38929 |
| Log likelihood                             | -692.1944   | Hannan-Quinn criter.  |             | 25.32214 |
| F-statistic                                | 30.63370    | Durbin-Watson stat    |             | 0.582904 |
| Prob(F-statistic)                          | 0.000000    |                       |             |          |

Hasil Uji Chow pada Tabel 7. menunjukkan bahwa nilai Prob. *cross-section F* sebesar 0,2841 dan nilai Prob. *Chi-square* sebesar 0,1547 yang nilainya ( $0,2841 > 0,05$ ) dan ( $0,1547 > 0,05$ ), sehingga  $H_0$  diterima, maka model yang terpilih adalah model PLS.

### Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk memilih model terbaik diantara dua pendekatan yaitu *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* yang akan dipakai dalam model penelitian. Dengan statistik uji P-value < maka  $H_0$  ditolak dan model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* begitu juga jika P-value > maka  $H_0$  diterima dan model yang dipilih adalah *Random Effect Model*.

**Tabel 8. Hasil Estimasi Uji Hausman**

| Correlated Random Effects - Hausman Test       |                   |              |               |        |
|--|-------------------|--------------|---------------|--------|
| Pool: Untitled                                 |                   |              |               |        |
| Test cross-section random effects              |                   |              |               |        |
| Test Summary                                   | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob.         |        |
| Cross-section random                           | 0.256627          | 2            | 0.8796        |        |
| Cross-section random effects test comparisons: |                   |              |               |        |
| Variable                                       | Fixed             | Random       | Var(Diff.)    | Prob.  |
| JP?  | -28.500106        | -43.083479   | 967.658729    | 0.6392 |
|  | 141677.27782      |              | 5977727397.19 |        |
| JS?  | 3 129448.117299   |              | 4073          | 0.8743 |

Cross-section random effects test equation:  
 Dependent Variable: BP?  
 Method: Panel Least Squares  
 Sample: 2010 2014  
 Included observations: 5  
 Cross-sections included: 11  
 Total pool (balanced) observations: 55

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C        | -5653831.   | 3432519.   | -1.647138   | 0.1070 |
| JP?      | -28.50011   | 32.80502   | -0.868773   | 0.3899 |
| JS?      | 141677.3    | 79828.44   | 1.774772    | 0.0832 |

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

|                    |           |                       |          |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared          | 0.646782  | Mean dependent var    | 328760.2 |
| Adjusted R-squared | 0.545862  | S.D. dependent var    | 105328.9 |
| S.E. of regression | 70980.90  | Akaike info criterion | 25.38127 |
| Sum squared resid  | 2.12E+11  | Schwarz criterion     | 25.85573 |
| Log likelihood     | -684.9850 | Hannan-Quinn criter.  | 25.56475 |
| F-statistic        | 6.408889  | Durbin-Watson stat    | 0.728768 |
| Prob(F-statistic)  | 0.000003  |                       |          |

Berdasarkan hasil pengujian Tabel 8. diketahui bahwa nilai Prob. *Cross section random* sebesar 0,8796, yang nilainya ( $0,8796 > 0,05$ ), sehingga  $H_0$  diterima, maka dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah *Random Effect Model (REM)*.

**Uji Lagrange Multiplier (LM Test)**

Uji Lagrange Multiplier (*Breusch – Pagan Random Effect*) digunakan untuk memastikan model yang akan di pakai. Dasar dilakukan uji ini adalah apabila hasil Uji Chow dan Uji Hausman tidak konsisten.

**Tabel 9. Hasil Estimasi Uji Lagrange Multiplier**

Lagrange multiplier (LM) test for panel data  
 Date: 25/07/16 Time: 11:08  
 Sample: 2010 2014  
 Total panel observations: 55  
 Probability in ()

| Null (no rand. effect)<br>Alternative | Cross-section        | Period               | Both                 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                       | One-sided            | One-sided            |                      |
| Breusch-Pagan                         | 26.07396<br>(0.0000) | 21.93326<br>(0.0000) | 48.00722<br>(0.0000) |
| Honda                                 | 5.106267<br>(0.0000) | 4.683296<br>(0.0000) | 6.922266<br>(0.0000) |
| King-Wu                               | 5.106267<br>(0.0000) | 4.683296<br>(0.0000) | 6.687522<br>(0.0000) |
| GHM                                   | --<br>--             | --<br>--             | 48.00722<br>(0.0000) |

Berdasarkan hasil pengujian Tabel 9. diketahui bahwa nilai Prob. *Breusch-Pagan* (BP) sebesar 0,0000, yang nilainya ( $0,0000 < 0,05$ ), sehingga  $H_0$  ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa model yang cocok adalah *Random Effect Model* (REM).

### **Pengujian Hipotesis dan Interpretasi Model REM**

Berdasarkan nilai F-statistik yaitu sebesar 30,064 dengan nilai Prob. 0,0000, menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama) jumlah pegawai dan jumlah SKPD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pegawai. Hasil perhitungan nilai R square yang sebesar 0,540909. Hal ini menunjukkan bahwa 54,10% naik turunnya jumlah pegawai dan jumlah SKPD mempengaruhi besar kecilnya belanja pegawai, sedangkan sisanya sebesar 45,90% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model.

Selanjutnya berdasarkan uji t, dapat dikemukakan bahwa secara parsial baik variabel jumlah pegawai (JP) dan jumlah SKPD (JS) berpengaruh signifikan terhadap belanja pegawai (dengan nilai Prob. masing-masing 0,0001 dan 0,0000). Jumlah pegawai memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap belanja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah pegawai, maka akan menurunkan belanja pegawai dan sebaliknya. Jumlah SKPD memiliki pengaruh positif yang signifikan yang menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah SKPD akan meningkatkan belanja pegawai dan sebaliknya.

Pengaruh negatif dari jumlah pegawai terhadap belanja pegawai pada dasarnya disebabkan bahwa belanja pegawai pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah pegawai, tetapi juga ditentukan oleh tingkat golongan dan keberadaan pendapatan diluar gaji dan tunjangan, seperti insentif KDH/WKDH, penunjang operasional pimpinan DPRD serta biaya pungut pajak. Keberadaan pegawai honorer yang jumlahnya cukup besar tetapi dengan alokasi belanja pegawai untuk tenaga honorer relatif kecil diduga menjadi salah satu faktor penyebab hubungan negatif antara jumlah pegawai dengan belanja pegawai

Estimasi *random effect model* juga menunjukkan adanya pengaruh individu dari data *cross-section* (kabupaten/kota) pada konstanta model penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kabupaten Batanghari, jika ada perubahan Jumlah Pegawai dan Jumlah SKPD baik antara kabupaten/kota maupun antar tahun, maka Kabupaten Batanghari akan mendapatkan pengaruh individu terhadap belanja pegawai sebesar -15627,80.
2. Kabupaten Bungo, jika ada perubahan Jumlah Pegawai dan Jumlah SKPD baik antara kabupaten/kota maupun antar tahun, maka Kabupaten Bungo akan mendapatkan pengaruh individu terhadap belanja pegawai sebesar 12921,51.
3. Kabupaten Kerinci, jika ada perubahan Jumlah Pegawai dan Jumlah SKPD baik antara kabupaten/kota maupun antar tahun, maka Kabupaten Kerinci akan mendapatkan pengaruh individu terhadap belanja pegawai sebesar 9364,901.
4. Kabupaten Merangin, jika ada perubahan Jumlah Pegawai dan Jumlah SKPD baik antara kabupaten/kota maupun antar tahun, maka Kabupaten Merangin akan mendapatkan pengaruh individu terhadap belanja pegawai sebesar 8233,791.
5. Kabupaten Muaro Jambi, jika ada perubahan Jumlah Pegawai dan Jumlah SKPD baik antara kabupaten/kota maupun antar tahun, maka Kabupaten Muaro Jambi akan mendapatkan pengaruh individu terhadap belanja pegawai sebesar 10987,01.
6. Kabupaten Sarolangun, jika ada perubahan Jumlah Pegawai dan Jumlah SKPD baik antara kabupaten/kota maupun antar tahun, maka Kabupaten Sarolangun akan mendapatkan pengaruh individu terhadap belanja pegawai sebesar 1498,419.
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, jika ada perubahan Jumlah Pegawai dan Jumlah SKPD baik antara kabupaten/kota maupun antar tahun, maka Kabupaten Tanjung

- Jabung Barat akan mendapatkan pengaruh individu terhadap belanja pegawai sebesar 10987,01.
8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jika ada perubahan Jumlah Pegawai dan Jumlah SKPD baik antara kabupaten/kota maupun antar tahun, maka Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan mendapatkan pengaruh individu terhadap belanja pegawai sebesar -19791,64.
  9. Kabupaten Tebo, jika ada perubahan Jumlah Pegawai dan Jumlah SKPD baik antara kabupaten/kota maupun antar tahun, maka Kabupaten Tebo akan mendapatkan pengaruh individu terhadap belanja pegawai sebesar -17895,39.
  10. Kota Jambi, jika ada perubahan Jumlah Pegawai dan Jumlah SKPD baik antara kabupaten/kota maupun antar tahun, maka Kota Jambi akan mendapatkan pengaruh individu terhadap belanja pegawai sebesar 1657,723.
  11. Kota Sungai penuh, jika ada perubahan Jumlah Pegawai dan Jumlah SKPD baik antara kabupaten/kota maupun antar tahun, maka Kota Sungai penuh akan mendapatkan pengaruh individu terhadap belanja pegawai sebesar -2435,961.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Secara rata-rata selama periode 2010-2014, perkembangan struktur belanja pegawai pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, belanja pegawai yang tertinggi terdapat pada Kota Jambi yaitu rata-rata sebesar 19,94% dan yang terendah adalah Kabupaten Kerinci rata-rata sebesar 5,31%.
2. Dari hasil analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pegawai pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa jumlah pegawai berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja pegawai kabupaten/kota di Provinsi Jambi, sedangkan jumlah SKPD berpengaruh positif dan signifikan.

### Saran

1. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi perlu melakukan review yang rinci dan menyeluruh terhadap berbagai kebijakan atas inisiatif sendiri dalam hal menaikkan anggaran belanja pegawai, sehingga komposisi anggaran belanja pegawai lebih rasional dan terukur sesuai dengan produktivitas.
2. Kenaikan anggaran belanja pegawai berakibat pada pembebanan anggaran belanja daerah, maka perlu dilakukan dengan cermat, seperti pemekaran SKPD dan penambahan jumlah pegawai CPNS. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan anggaran belanja pegawai dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adijanto. (2014). *Laporan Pelaksanaan Spending Performance dalam Mendanai Pelayanan Publik*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta.
- Anggarini dan Puranta. (2010). *Anggaran Berbasis Kinerja: Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Basri, H.; Delis, A; Junaidi . (2014). Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 81-90

- Burhanuddin, Ahmad. (2012). *Pengaruh Belanja Pegawai, Investasi Pemerintah dan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah Terhadap Fenomena Flypaper Effect*. Accounting Analysis Journal. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Darmawan dan Anantawikrama. (2015). *Pengaruh alokasi belanja modal dan belanja pemeliharaan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Bangli periode 2009-2013*. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Volume 03, No.01 Tahun 2015. Singaraja.
- Darwis.2009. *Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat*. Artikel Ilmiah. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang.
- Devita. A, Delis. A, Junaidi. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi*. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol.2. Nomor 2, Oktober-Desember 2014.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Hendrawati, Suryana. (2011). *Kinerja APBD dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo*. Tesis.Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Jambi. Jambi.
- Junaidi, J. (2015). *Bentuk Fungsional Regresi Linear (Aplikasi Model dengan Program SPSS)*. Jambi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Permendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan APBD.
- Rachmad, Agus. (2010). *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Hubungannya dengan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Batang Hari*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Jambi.
- Rahman, Fathor. (2013). *Analisis Pengaruh Determinan Belanja Daerah dan PAD di Provinsi Jambi*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Jambi.
- Rekanaharto.(2014). *Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2003-2012*.
- Rodianto, Bambang. (2012). *Analisis Determinasi Alokasi Anggaran dan Struktur Belanja Pegawai pada Kabupaten Bungo*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Jambi.
- Supriyani. (2014). *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Wilayah Pulau Sulawesi*. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Sulawesi.

Wahyudi. (2011). *Pengaruh Alokasi Belanja Daerah untuk Urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum Terhadap Penanggulangan Kemiskinan*. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.